

**ANALISIS *STAKEHOLDERS* (AKTOR KEBIJAKAN) DALAM
PENGEMBANGAN OBYEK WISATA CANDI GEDONGSONGO DI
KABUPATEN SEMARANG**

Tsuraya Annisa Salsabila, R. Slamet Santoso
**Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jl. Prof. H. Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman : [http// www.fisip.undip.ac.id](http://www.fisip.undip.ac.id) email fisip@undip.ac.id

Abstract

Tourism development is an effort to create the synergy in the use of tourism resources as well as to increase the role of government and local people in Semarang Regency that has a lot of tourist attractions, one of the priorities is Gedongsongo Temple. The development of Gedongsongo Temple is done by several related stakeholders. Every stakeholder has different roles and tasks. The roles must correspond to every stakeholder's scope so that the stakeholders analysis is being done in the process of the development; it is needed to prevent the overlapping and and to see the effectiveness of the stakeholders' roles. By all means, the analysis connects each of the stakeholders who are involved on the development of Gedongsongo Temple. The connection produces a policy network. The result of the policy network helps every stakeholder to coordinate and to support one and another so that there will be no misconcepting and overlapping.
Keyword: tourism development, role effectiveness, policy network

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan adalah suatu kegiatan atau proses yang dilakukan oleh manusia secara sadar dan terus menerus untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Sehingga setiap negara, baik negara berkembang maupun negara maju melaksanakan pembangunan untuk

mencapai tujuan atau cita-citanya yaitu meningkatkan kemakmuran atau kesejahteraan bangsa. Dalam misi Pembangunan Indonesia “mewujudkan Indonesia yang berdaya saing” dilakukan dengan pengembangan pariwisata. Pariwisata adalah kunci pembangunan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. *United Nation World Tourism Organizations* (UNWTO)

mengakui bahwa sektor pariwisata adalah sektor unggulan (*tourism is a leading sector*) dan merupakan salah satu kunci penting untuk pembangunan wilayah di suatu negara dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Pengembangan pariwisata dilakukan tidak hanya oleh Pemerintah Pusat tetapi juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah supaya sesuai dengan potensi masing-masing.

Kabupaten Semarang adalah salah satu daerah yang saat ini sedang melakukan pengembangan obyek wisata terutama pada obyek wisata Candi Gedongsongo. Pengembangan obyek wisata ini dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang. Peraturan Bupati Semarang Nomor 111 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Semarang Tahun 2010-2030, bidang Pengembangan ODTW memiliki tupoksi sebagai bidang yang melakukan inovasi atau perkembangan serta mengurus tentang data-data pengunjung objek

wisata yang ada di Kabupaten Semarang. Potensi unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Semarang terutama di bidang industri pariwisata dan pertanian (INTANPARI), hal ini tidak terlepas dari posisi geografis Kabupaten Semarang yang mempunyai letak strategis serta anugerah potensi dan kekayaan alam yang tidak dimiliki oleh daerah lain sebagai modal yang harus dikelola dengan seoptimal mungkin. Dinas terkait yaitu Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang masih perlu untuk lebih mengembangkan daerah pariwisata agar dapat dimanfaatkan secara maksimal dan memberikan dampak yang besar bagi masyarakatnya.

Menurut Kepala Bidang Pengembangan Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang permasalahan utama pada pembangunan sarana, prasarana, dan fasilitas umum pariwisata di Candi Gedongsongo Kabupaten Semarang adalah lemahnya koordinasi *stakeholders* pariwisata guna sinkronasi dalam pembangunan urusan kepariwisataan.

Pengembangan obyek wisata Candi Gedongsongo ini selain aktor kebijakan terdapat juga unsur lain yang ikut berperan penting yaitu jejaring kebijakan suatu program akan lebih mudah dilaksanakan apabila pelaksanaan program mengidentifikasi *stakeholders*, kepentingan mereka, dan apa yang mereka dukung (ketertarikan) serta strategi organisasi publik untuk dapat bekerja sama. Hubungan yang saling ketergantungan jelas mempengaruhi pengembangan di Candi Gedongsongo Kabupaten Semarang.

Adanya beberapa *stakeholders* yang ikut serta dalam pengembangan tersebut pasti tidak mudah dalam melakukan pengembangan, terjadi beberapa kendala dalam pelaksanaan pengembangan Candi Gedongsongo di Kabupaten Semarang. *Stakeholders* berperan penting dalam pengembangan di Candi Gedongsongo, jika koordinasi *stakeholders*, atau jejaring kebijakannya tidak dapat berjalan dengan baik maka pengembangan yang terjadi tidak dapat berjalan sesuai dengan harapan seperti

terhambatnya pembangunan. Maka dari itu pengembangan tersebut dibutuhkan analisis *stakeholders*, dimana dengan adanya *stakeholders* itu dapat dilihat pengembangan yang dilakukan sudah dengan benar dijalankan dan sesuai dengan tupoksi pada *stakeholders* yang berperan.

Analisis *stakeholders* dilakukan untuk melihat bagaimana aktor-aktor kebijakan yang ikut serta dan berperan dalam pengembangan obyek wisata Candi Gedongsongo melakukan tugasnya serta bagaimana hubungan/jejaring kebijakan antar aktor kebijakan yang ada. Adanya analisis *stakeholders* ini dapat dilihat dari bagaimana pengembangan Candi Gedongsongo yang melibatkan banyak pihak sudah sesuai dengan tupoksi masing-masing atau belum.

“Analisis *Stakeholders* (Aktor Kebijakan) Dalam Pengembangan Obyek Wisata Candi Gedongsongo di Kabupaten Semarang”.

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis *stakeholders* dan Jejaring

Kebijakan dalam Pengembangan Obyek Wisata Candi Gedongsongo di Kabupaten Semarang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas peran *stakeholders* dan hubungan *stakeholders* dalam pengembangan obyek wisata Candi Gedongsongo..

D. Tinjauan Pustaka

1. Formulasi Kebijakan Publik

Administrasi Publik adalah penggabungan antar teori dan praktek dengan sumber day dan personal publik di organisir dan dikoordinasikan agar dalam pelaksanaan kebijakan pubik ini dapat lebih responsif terhadap kebutuhan publik yang bertujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah. Salah satu ruang lingkup administrasi publik adalah kebijakan publik yang membahas mengenai segala sesuatu hubungan antara unit pemerinah dengan lingkungannya yang memiliki serangkaian kegiatan yang

mempunyai tujuan dan dilaksanakan bersama dengan memperhatikan permasalahan tertentu yang nantinya akan terkait dengan formulasi kebijakan.

Dalam kebijakan publik terdiri dari beberapa tahapan salah satunya adalah Formulasi Kebijakan yaitu rangkaian proses pembuatan sebelum menetapkan sebuah kebijakan untuk diimplementasikan. Agenda Setting Kebijakan Publik merupakan salah satu tahap penting dalam Formulasi Kebijakan. Tujuan dari Agenda Setting adalah untuk menjelaskan mekanisme dan dinamika dari transformasi suatu kondisi dalam masyarakat menjadi suatu masalah kebijakan yang harus dicarikan jalan keluarnya melalui penggunaan kekuasaan pemerintahan untuk membuat kebijakan.

2. Efektivitas Peran

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Susanto (2005:156) efektifitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi

atau tingkat kemampuan pesan-pesan unuk mempengaruhi. Menurut pengertian tersebut, efektifitas bisa diartikan sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang. Efektifitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan keberhasilan suatu usaha dalam mencapai target dan tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya.

Istilah peran dapat diartikan sebagai keterlibatan atau keikutsertaan secara aktif dalam suatu proses pencapaian tujuan yang dilakukan oleh pribadi atau kelompok yang di organisir serta berlandaskan kemampuan yang memadai, turut serta dalam mewujudkan tujuan dengan rasa tanggung jawab yang dijiwai oleh rasa turut memiliki atau kesadaran dalam melaksanakan kegiatan dalam Rafid (2009). Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan peran adalah

suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar dan melibatkan diri pada suatu kegiatan dalam rangka mendukung kegiatan tersebut. Dari kedua penjelasan efektifitas dan peran diatas dapat disimpulkan efektifitas peran adalah perilaku dalam melibatkan dan mengikutsertakan diri kepada sebuah kegiatan dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan melakukan usaha yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Efektivitas Peran dapat dilihat melalui Analisis *Stakeholders*. Analisis *stakeholders* adalah teknik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menilai kepentingan dari pihak-pihak kunci, kelompok, atau institusi yang ikut andil dalam melakukan suatu kegiatan/program. Analisis *Stakeholders* menurut Blackman (2003:23) terdapat beberapa tahapan yaitu : 1) Tingkat Ketertarikan *Stakeholders*; 2) Pengaruh dan Kepentingan *Stakeholders*; 3) Identifikasi Peran *Stakeholders*.

3. Jejaring Kebijakan

Jejaring kebijakan adalah suatu hubungan yang terbentuk akibat koalisi diantara aktor pemerintah, masyarakat termasuk privat. Jejaring kebijakan terbentuk dan berkembang menjadi bermacam-macam jenis tergantung pada intensitas dan dominasi hubungan yang terjadi diantara aktor. Kegiatan saling mempengaruhi diantara para aktor akan membentuk suatu parameter-parameter yang relatif stabil. Jejaring kebijakan menjadi tumbuh dengan bermacam jenis tergantung pada intensitas hubungan aktor dan dominasi salah satu aktor.

4. Pengembangan Pariwisata

Pengembangan pariwisata merupakan suatu rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata mengintegrasikan segala bentuk aspek di luar pariwisata yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung akan kelangsungan pengembangan pariwisata, (Swarbrooke 1996;99). Dalam pengembangan pariwisata diperlukan beberapa aspek yang mendukung antara lain : 1)

Aspek Fisik; 2) Aspek Daya Tarik Pariwisata; 3) Aspek Aksesibilitas; 4) Aspek Aktivitas dan Fasilitas; 5) Aspek Sosial Ekonomi dan Budaya.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif yang dilakukan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan yang digunakan adalah teknik *purposive sampling*. Sementara analisis data dilakukan dengan metode analisis Miles dan Huberman yang langkahnya terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2009: 246).

HASIL PENELITIAN

A. Efektivitas Peran *Stakeholders* Dalam Pengembangan Obyek Wisata Candi Gedongsongo di Kabupaten Semarang

Stakeholders menurut definisinya adalah kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan

kelangsungan hidup suatu organisasi atau negara. Clarkson dalam *Gabler Edition Wissenschaft* (2008:6) membagi *stakeholders* menjadi dua yaitu *stakeholders* primer dan *stakeholders* sekunder.

Stakeholders primer adalah pihak dimana tanpa keterlibatannya yang berkelanjutan organisasi tidak dapat bertahan. Menurut Clarkson, suatu organisasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem *stakeholders* primer yang merupakan rangkaian kompleks hubungan antara kelompok-kelompok kepentingan yang mempunyai hak, tujuan, harapan dan tanggung jawab yang berbeda.

Stakeholders sekunder didefinisikan sebagai pihak yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh organisasi, tetapi mereka tidak terlibat dalam transaksi dengan organisasi dan tidak begitu penting untuk kelangsungan hidup organisasi.

1. Analisis *Stakeholders* Dalam Pengembangan Obyek Wisata

Candi Gedongsongo di Kabupaten Semarang.

a. Tingkat Ketertarikan *Stakeholders*

Pada tahapan ini stakeholder dipisahkan berdasarkan *stakeholders* primer dan *stakeholders* sekunder.. *Stakeholders* primer dan sekunder kemudian dijelaskan ketertarikannya dan juga diberi penilaian prioritas. Tahapan awal yang digunakan untuk melihat siapa saja *stakeholders* yang ikut andil dalam pengelolaan dan pengembangan Candi Gedongsongo. Tahapan ini melihat bagaimana ketertarikan setiap *stakeholders* yang tidak sama satu sama lain dan bagaimana pengaruh ketertarikan itu pengelolaan dan pengembangan Candi Gedongsongo.

Dari tahap *stakeholders* yang ada dibedakan menjadi *stakeholders* primer dan *stakeholders* sekunder. Menurut Clarkson dalam *Gabler Edition Wissenschaft* (2008:6) *stakeholders* primer adalah pihak dimana tanpa keterlibatannya yang berkelanjutan organisasi tidak dapat bertahan. Pada penelitian ini yang dimaksud dengan *stakeholders*

primer adalah mereka/pihak yang selalu ada pada setiap tahapan pengembangan. Stakeholders sekunder adalah pihak yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh organisasi, stakeholders ini dalam penelitian pengembangan obyek wisata Candi Gedongsongo adalah pihak yang ikut mempengaruhi tetapi tidak ikut dalam setiap pengembangan dan banyak terlibat dalam pengembangan obyek wisata Candi Gedongsongo.

b. Pengaruh dan Kebijakan *Stakeholders*

Beberapa stakeholders pasti memiliki pengaruh yang lebih dibandingkan dengan yang lain. Ketika beberapa merasa memiliki pengaruh yang membuat ketertarikan mereka lebih berhasil, yang lain akan merasa terancam atau merasa tidak dibutuhkan. Maka dari itu tahapan yang kedua digunakan untuk melihat apakah prioritas mereka sepadan dengan pengaruhnya. *Stakeholders* dipisahkan dalam kotak yang berbeda untuk mengetahui bagaimana pengaruh dan kepentingan *stakeholders* mana yang

lebih memiliki pengaruh dan kepentingan yang stabil.

c. Identifikasi Peran *Stakeholders*

Pada tahap ini yang dilakukan adalah mengidentifikasi bagaimana setiap stakeholders berperan disetiap tahapan dalam pengelolaan dan pengembangan obyek wisata Candi Gedongsongo. Tabel yang terdiri dari empat jenis peran dan lima tahapan pengembangan tersebut diisi sesuai dengan kondisi dan analisis yang sudah dilakukan di dua tabel sebelumnya (Tingkat Ketertarikan dan Pengaruh serta Kepentingan Stakeholders). Setelah setiap stakeholders dimasukkan berdasarkan jenis perannya kemudian disimpulkan apakah stakeholders tersebut termasuk kedalam stakeholders yang mengikuti stakeholders lain (decided by others) atau stakeholders yang diikuti oleh stakeholders lain (decided by ourself).

B. Jejaring Kebijakan Dalam Pengembangan Obyek Wisata Candi Gedongsongo di Kabupaten Semarang

Jejaring kebijakan adalah suatu hubungan yang terbentuk akibat koalisi diantara aktor pemerintah, masyarakat termasuk privat. Jejaring kebijakan terbentuk dan berkembang menjadi bermacam-macam jenis tergantung pada intensitas dan dominasi hubungan yang terjadi diantara aktor.

Pariwisata adalah salah satu bahasan yang luas dalam pengembangannya sehingga terdiri dari banyak *stakeholders* dan adanya kerjasama dalam melakukan pengembangan. Pengembangan ini dilakukan untuk menarik pengunjung untuk terus mengunjungi obyek wisata. Berkembangnya kebutuhan masyarakat akan wisata terus mendorong dinas pengelola wisata terutama Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang untuk mengembangkan potensi wisata yang ada di daerahnya. Candi Gedongsongo yang merupakan potensi wisata terbaik di Kabupaten Semarang menjadi salah satu wadah untuk melakukan jejaring kebijakan.

Pengembangan Obyek Wisata Candi Gedongsongo terdapat

perjanjian antar *stakeholders* di Kabupaten Semarang Nomor 415.4/01.1/KJS/2015. Perjanjian ini dibuat untuk lebih menjelaskan hubungan antar *stakeholders* yang ikut dalam pengembangan obyek wisata Candi Gedongsongo.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Peran *Stakeholders* Dalam Pengembangan Obyek Wisata Candi Gedongsongo di Kabupaten Semarang

Identifikasi *stakeholders* berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan terdapat tujuh *stakeholders* yang ikut andil dalam pengelolaan dan pengembangan obyek wisata Candi Gedongsongo, setiap *stakeholders* memiliki peran masing-masing dalam pengembangan obyek wisata Candi Gedongsongo di Kabupaten Semarang. *Stakeholders* yang terkait pengelolaan dan pengembangan obyek wisata Candi Gedongsongo antara lain : (a) Dinas Pariwisata (DISPARTA) Kabupaten Semarang; (b) BPCB Jawa Tengah; (c) Perum Perhutani Jawa Tengah; (d) Penjaga Tiket di Candi

Gedongsongo; (e) Kelompok Juru Parkir, Pedagang, Penyewaan Kuda (Warga Sekitar) di Candi Gedongsongo, (f) Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BARENLITBANGDA) Kabupaten Semarang, (g) Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Semarang.

1. Analisis *Stakeholders* Dalam Pengembangan Obyek Wisata Candi Gedongsongo di Kabupaten Semarang

a. Tingkat Ketertarikan *Stakeholders*

Ketujuh *stakeholders* yang ikut andil dalam pengembangan obyek wisata Candi Gedongsongo dikelompokkan berdasarkan *stakeholders* primer dan sekunder serta bagaimana ketertrikan mereka dan nilai prioritasnya. *Stakeholders* primer terdiri dari Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, BPCB Jawa Tengah, Perum Perhutani Jawa Tengah, dan Perwakilan Paguyuban Juru Parkir, Pedagang dan Penyewa Kuda (Warga Sekitar) di Candi Gedongsongo. Sedangkan *stakeholders* sekunder terdiri dari

Pegawai Pengelola Tiket Candi Gedongsongo,

BARENLITBANGDA Kabupaten Semarang, DPU Kabupaten Semarang. Ketertarikan setiap *stakeholders* pada tahap ini berbeda-beda sesuai dengan ruang lingkup kerjanya masing-masing.

b. Pengaruh dan Kepentingan *Stakeholders*

Pengaruh dan kepentingan *stakeholders* adalah tahapan selanjutnya yang membahas bagaimana pengaruh dan kepentingan *stakeholders* dalam ketertarikan mereka. Dinas Pariwisata, BPCB, dan Warga Sekitar memiliki tingkat pengaruh dan kepentingan yang paling tinggi dan stabil. Perum Perhutani dan Pegawai Pengelola tiket memiliki kepentingan yang tinggi tetapi tidak dapat memafaatkan kepentingan tersebut untuk mempengaruhi *stakeholders* lain dalam pengembangan.

BARENLITBANGDA dan DPU memiliki pengaruh yang cukup tinggi bahkan hampir setara dengan Warga

Sekitar tetapi tidak memiliki kepentingan yang cukup, sehingga kedua *stakeholders* ini dapat dikatakan ikut memberikan pengaruh yang cukup tinggi dalam pengembangan Obyek Wisata Candi Gedongsongo.

c. Identifikasi Peran *Stakeholders*

Pada tahap terakhir analisis *stakeholders* dilakukan untuk melihat bagaimana peran mereka dalam setiap tahap pengembangan. Dinas Pariwisata menjadi *stakeholders* yang memiliki peran paling menonjol dan menjadi dominan karena selalu termasuk dalam semua jenis peran yang ada dalam tahapan pengembangan. *Stakeholders* lain memang termasuk dalam jenis peran yang ada tetapi tidak selalu ada dalam setiap tahapan. Berbeda dengan Dinas Pariwisata yang selalu mengikuti semua tahapan dan semua peran dalam pengembangan.

B. Jejaring Kebijakan Dalam Pengembangan Obyek Wisata Candi Gedongsongo di Kabupaten Semarang

Dalam penelitian ini jejaring kebijakan yang dimaksud adalah hubungan antar *stakeholders* yang terjalin dalam pengembangan obyek wisata Candi Gedongsongo dimana saat ini hubungan *stakeholders* tersebut terikat oleh perjanjian yang biasa disebut dengan Perjanjian Tripartite. Perjanjian ini mengikat tiga pihak *stakeholders* yaitu Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, BPCB Jawa Tengah, Perum Perhutani Jawa Tengah.

Jejaring kebijakan tidak hanya dilihat dari hubungan antar *stakeholders* yang terkait saja tetapi juga dapat dilihat melalui efektifitas peran *stakeholders* yang dilakukan pada saat *stakeholders* melakukan kegiatan dalam pengembangan obyek wisata Candi Gedongsongo. Pada penelitian ini jejaring kebijakan yang ada dalam pengembangan obyek wisata Candi Gedongsongo berdasarkan Koalisi Advokasi yang bersifat *universal* masih memiliki kekurangan. Hubungan antar aktor memang baik tetapi koordinasi antar aktor dirasa masih perlu perhatian khusus. Dalam Perjanjian Kerjasama

Nomor 415.4/01.1/KJS/2015 pada bab 1 pasal 1 dijelaskan maksud kerjasama ini adalah untuk mensinergikan dan memadukan pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Semarang.

Tujuan dari kerjasama ini adalah secara bersama-sama ikut berperan dalam pengelolaan obyek wisata Candi Gedongsongo beserta situs Gedongsongo secara terpadu dan melakukan bagi hasil dari pengelolaan retribusi masuk obyek wisata Candi Gedongsongo beserta Situs Gedongsongo. Awal hubungan antar *stakeholders* yang terjadi dalam pengembangan obyek wisata Candi Gedongsongo didasari oleh perjanjian yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati yaitu adanya tiga *stakeholders* yang saling membantu dalam pengelolaan dan pengembangan obyek wisata Candi Gedongsongo.

Saat ini hubungan antar *stakeholders* atau jejaring yang ada sudah mengikat tujuh *stakeholders* untuk ikut andil dalam pengelolaan serta pengembangan. Adanya jejaring ini menyebabkan pembagian

wilayah pengelolaan dan pengembangan oleh beberapa pihak. Jejaring yang ada saat ini secara hubungan memang sudah cukup baik berdasarkan data wawancara yang telah peneliti lakukan, tetapi pada koordinasi setiap *stakeholders* masih membutuhkan perhatian lebih dari setiap *stakeholders*.

Saat ini koordinasi antar *stakeholders* dilakukan apabila akan melakukan pengelolaan ataupun pengembangan saja. Selain itu, saat ini belum ada waktu khusus dalam melakukan koordinasi antar dinas terkait. Perjanjian Tripartite membuat tiga dinas terkait terus menjaga hubungan dan koordinasi dalam melaksanakan pengelolaan dan pengembangan Candi Gedongsongo, apabila satu dinas ingin melakukan pengembangan akan saling berkoordinasi dengan dinas yang lain.

Namun, koordinasi ini dilakukan secara mendadak apabila akan ada pengembangan atau proyek sedangkan untuk setiap bulannya belum ada waktu rutin untuk saling melaporkan hasil yang ada. Begitu

pula dengan jejaring antara pihak pemerintah dengan masyarakat sekitar. Pemerintah memberikan sosialisasi namun masyarakat tidak ikut serta dalam sosialisasi sehingga sosialisasi yang dilakukan dirasa sia-sia. Sedangkan jejaring kebijakan dalam pengembangan Candi Gedongsongo jika dilihat dari efektivitas peran *stakeholders*nya, jejaring kebijakannya dapat dikatakan masih kurang baik karena efektivitas peran *stakeholders* dalam pengembangan masih belum berjalan dengan baik.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Efektivitas peran *stakeholders* dalam Pengembangan obyek wisata Candi Gedongsongo yang dilakukan oleh tujuh *stakeholders* yaitu Dinas Pariwisata Kab. Semarang, BPCB Jawa Tengah, Perum Perhutani, Perwakilan Paguuban Juru Parkir, Pedagang, dan Penyewaan Kuda (Warga Sekitar), Pengelola Tiket Candi Gedongsongo, BARENLITBANGDA Kab. Semarang, DPU Kab. Semarang

belum dapat dikatakan efektif. Hal ini disebabkan karena kepentingan dan pengaruh *stakeholders* masih ada yang belum sesuai. Sehingga Efektivitas peran *stakeholders* dalam pengembangan Candi Gedongsongo dirasa belum efektif karena terdapat *stakeholders* yang masih belum melaksanakan tugasnya dengan baik, peran yang dilakukan dalam pengembangan obyek wisata Candi Gedongsongo belum maksimal sehingga pengembangannya cenderung tidak cepat.

2. Hubungan antar *stakeholders* dalam pengembangan obyek wisata Candi Gedongsongo secara hubungan memang sudah baik tetapi dalam koordinasi *stakeholders* belum dapat dikatakan baik. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya forum khusus terjadwal antara *stakeholders* baik yang terikat perjanjian maupun yang tidak terikat dengan perjanjian. Sedangkan jejaring kebijakan yang dilihat dari efektivitas peran *stakeholders* juga masih belum baik karena berdasarkan hasil

penelitian peneliti, efektivitas peran *stakeholders* dalam pengembangan obyek wisata Candi Gedongsongo masih belum tercapai. Melihat adanya jarak kepentingan dan pengaruh pada *stakeholders* primer dan sekunder pasti menyebabkan adanya ketidaktepatan hubungan *stakeholders* dalam pengembangan Candi Gedongsongo.

Dinas Pariwisata sebagai *stakeholders* primer yang memiliki kepentingan dan pengaruh yang paling tinggi diantara *stakeholders* primer lain menjadikan dinas ini sebagai titik pusat dalam pengembangan padahal seharusnya hubungan antar *stakeholders* terlebih *stakeholders* primer harus seimbang. Hal ini menunjukkan bahwa jejaring kebijakan antar *stakeholders* masih belum baik karena *stakeholders* sekunder dirasa lebih bisa atau ada kemungkinan lebih memiliki pengaruh dibandingkan dengan *stakeholders* primer.

B. Rekomendasi

1. Rekomendasi dalam rangka meningkatkan efektivitas peran *stakeholders* yang diberikan oleh peneliti adalah :
 - a. *Stakeholders* dalam pengembangan harus saling mengerti peran yang mereka lakukan.
 - b. *Stakeholders* yang sudah mengetahui perannya harus dapat menerapkan peran tersebut dalam proses pengembangan.
 - c. Pelaksanaan peran *stakeholders* yang sudah sesuai dapat meningkatkan proses pengembangan dan tujuan yang sudah ditetapkan dapat tercapai.
2. Rekomendasi dalam rangka memaksimalkan hubungan *stakeholders* / Jejaring kebijakan yang diberikan oleh peneliti adalah :
 - a. Membentuk forum khusus terjadwal untuk memudahkan koordinasi.
 - b. Menerapkan sanksi tegas apabila ada *stakeholders* yang tidak melakukan perannya dengan kurun waktu tertentu.

- c. Melakukan kerjasama dengan pihak/dinas lain yang dapat meningkatkan pengembangan.

DAFTAR ISI

Buku :

Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

Babiuch, William M. & Farhar, Barbara C. 1994. *Stakeholder Analysis Methodologies Resource Book: U.S. National Renewable Energi Laboratory*

Creswell, John w. 2012. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Belajar

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Jurnal :

Blackman, Rachel. 2003. "Peoject Cycle Management". *Roots : Resourcing Organizations with Opportunities for Transformation and Sharing*. Tearfund.

Suwitri, Sri. 2008. "Jejaring Kebijakan Dalam Perumusan Kebijakan Publik : Suatu Kajian Tentang Perumusan Kebijakan Penanggulangan Banjir dan Rob Pemerintah Kota Semarang". *Jurnal*. Volume VI No 3

Suwitri, Sri, 2011, "Jejaring Kebijakan Publik: Kerangka Baru Penyelenggaraan Pemerintahan". Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Administrasi Publik Universitas Diponegoro, online (eprints.undip.ac.id/28185/1/Sri_Suwitri.pdf)

Peraturan :

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Di Kabupaten Semarang

Peraturan Bupati Semarang Nomor 111 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (Ripparda) Kabupaten Semarang Tahun 2010-2030

Dokumen Lain :

Modul Pelatihan Analisis Kebijakan . 2015. *Pemetaan Pemangku Kepentingan (Stakeholders Mapping)* . Jakarta: Deputi Bidang Kajian Kebijakan.

Rencana Strategis Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Tahun 2015-2019

Kabupaten Semarang Dalam Angka Tahun 2017

Kecamatan Bandungan Dalam Angka Tahun 2017